

BUKU SAKU



KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Buku Saku

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Program Penurunan Emisi
Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi
Hutan di Kalimantan Timur



Tujuan

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*) disiapkan sebagai dokumen operasional proyek program penurunan emisi di Kalimantan Timur **bertujuan untuk:**

1. Mengkaji dampak-dampak potensial;
2. Menyiapkan rencana dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan;
3. Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

ESMF ini sejalan dengan **kebijakan operasional World Bank** (*OP/Operational Policies* atau *BP/Bank Policies*) dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku bagi program penurunan emisi terdiri dari:

1. Penilaian Lingkungan (OP/BP 4.01);
2. Habitat Alam (OP/BP 4.04);
3. Manajemen Hama (OP/BP 4.09);
4. Masyarakat Adat (OP/BP 4.10);
5. Pemukiman Kembali Paksa (OP/BP 4.12);
6. Hutan (OP/BP 4.36).

Prosedur ESMF

ESMF menetapkan prosedur untuk mengatasi dan memitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dari pelaksanaan kegiatan program penurunan emisi **melalui penerapan praktik-praktik terbaik.**

Prosedur ESMF meliputi:

1. Konsultasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan terkait;
2. Langkah pengembangan kapasitas yang tepat;
3. Penyaringan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial;
4. Kerangka kerja untuk merumuskan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang terkait dengan kode praktik lingkungan, izin

lingkungan, studi nilai konservasi tinggi, mekanisme pengaduan, kerangka proses, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik;

5. Memantau dan melaporkan implementasi kerangka kerja dan kerangka pengaman melalui sistem yang ada.

ESMF juga mencakup prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial untuk implementasi dan pemantauan kegiatan komponen 1 hingga 4 Program Penurunan Emisi Kaltim.

Kegiatan ini mencakup:

- Penyaringan daftar negatif,
- Penyaringan awal risiko dan dampak,
- Kode dan praktik lingkungan,
- Pedoman untuk pengelolaan hama terpadu,
- Pedoman HCV,
- Izin lingkungan,
- Langkah-langkah manajemen dan pemantauan FGRM, IPPF, RPF dan PF.

Mitigasi Penurunan Emisi

Kajian risiko dan langkah mitigasi berdasarkan komponen program penurunan emisi di Kaltim.

Komponen 1. Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

- **Isu sosial utama (1):** Konflik dengan unit manajemen (mendukung pengakuan hutan adat).
- **Mitigasi (1):** Identifikasi konflik-konflik kehutanan berdasarkan Surat Edaran nomor SE.1/Menlhk-II/2015 terkait penanganan kasus-kasus lingkungan dan kehutanan.
- **Mitigasi (2):** Pendirian komite untuk Hukum Masyarakat Adat di tingkat kabupaten.
- **Penanggung jawab (1):** DPMPD, Dishut Provinsi Kaltim, Asisten 1 Sekda Kaltim.

- **Isu sosial utama (2):** Konflik-konflik terkait batas desa (memperkuat perencanaan wilayah pedesaan).
- **Mitigasi (2):** Kompilasi petunjuk-petunjuk umum dan teknis bagi persiapan perencanaan tata ruang desa.
- **Penanggung jawab (2):** BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), DPMPD (Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa).

Komponen 3. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Areal Berlisensi

- **Isu sosial utama:** Memiliki potensi untuk membatasi akses dan aktivitas masyarakat untuk memanfaatkan lahan, kayu dan hasil hutan non kayu di lahan HCV dan berpotensi konflik dengan perusahaan.
- **Mitigasi:**
 - Pemegang konsensi mengidentifikasi HCV bersama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
 - Pemegang konsesi menyiapkan pengelolaan dan pemantauan area HCV yang melibatkan para pihak dan masyarakat.
 - Pemegang izin menyebarkan hasil identifikasi HCV ke masyarakat dan para pihak terkait.
 - Pemegang konsesi dan masyarakat menyetujui keberadaan HCV, dan langkah-langkah untuk mengelola dan memantau pengelolannya.
- **Penanggung jawab:** Disbun dan DPMPD (kabupaten/kota), Dishut dan Disbun (provinsi), KPH, KLHK, Pihak swasta, peneliti dari universitas lokal, dan LSM (TNC, GIZ, GGGI, WWF, dan lain-lain).

Komponen 5. Alternatif Mata Pencarian Bagi Masyarakat

- **Isu sosial utama (1):** Secara perlahan mengeliminir nilai-nilai dan budaya masyarakat lokal dan asli.
- **Mitigasi (1):** Mengakui dan mengakomodir nilai dan praktek masyarakat adat dan hutan adat; serta memperkuat program inovasi desa.
- **Isu sosial utama (2):** Ada potensi konflik yang disebabkan tidak semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan kurangnya kesadaran akan konservasi hutan.

- **Mitigasi (2):** Pelaksanaan FPIC program Kampung Iklim, Perhutanan Sosial, dan lainnya; serta memperkuat FGRM pada level proyek dan menghubungkannya ke nasional FGRM (yang dikelola oleh KLHK, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).
- **Penanggung jawab (1) (2):** DPMPD (provinsi dan kabupaten), Dishut dan DLH (provinsi dan kabupaten), KPH, Dirjen PSKL (nasional) dan BPSKL (region Kaltim), serta Dishut Kaltim (pemantau aktivitas lapangan).

Struktur Organisasi Pelaksana ESMF

Institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ESMF dan membuat pelaporan yaitu:

1. **Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim** (Penanggung jawab di level provinsi), bertanggung jawab membuat laporan safeguards ke *National Project Management Unit* (NPMU).
2. **Dinas Lingkungan Hidup Kaltim (Koordinator)**, bertanggung jawab untuk:
 - Memfasilitasi diskusi safeguards dengan OPD;
 - Melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan safeguards oleh OPD;
 - Menelaah dokumen safeguards;
 - Menyoroti isu-isu utama terkait safeguards.
3. **OPD Pelaksana** (Dishut, Disbun, Distan, DPMPD, KPH, Dinas ESDM, Bupati terkait izin-izin, dan Kepala Desa terkait Kampung Iklim), bertanggung jawab untuk:
 - Pelaksanaan safeguards dengan membuat daftar dampak negatif, melakukan penyaringan serta risiko sosial dan lingkungan;
 - Mengidentifikasi dampak potensial, menyiapkan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi yang relevan

(AMDAL/UKL-UPL, ESMP/RPL-RPL, ECOPs, HCV, FGRM, IPMP, IPPF, RGP/PF, CFP);

- Pengungkapan dokumen-dokumen safeguards.

Pemantauan dan Pelaporan

Berbagai kegiatan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan diantaranya:

- Laporan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (e.g., ESMP) dan juga pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL, dan dokumen lain yang relevan;
- Merekam proses: (1) FPIC dan (2) Pelaksanaan kerangka partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan;
- Indikator-indikator sosial dan lingkungan: (1) akses ke lahan dan sumber daya alam; (2) Konflik dan perselisihan di kawasan hutan dan APL; (3) Keanekaragaman hayati, dan lain-lain;
- Umpan balik dari masyarakat asli/adat/lokal terhadap pelaksanaan ESMF.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menentukan:

- Jika kebijakan yang terkait untuk mendukung kerangka pengamaman (kebijakan, hukum dan kerangka institusi) dibangun dan dilaksanakan.
- Jika mekanisme kerangka pengaman didisain dan diimplementasikan; dan
- Jika risiko-risiko sosial dan lingkungan direspon dengan baik.

Waktu pelaksanaan pemantauan dan pelaporan yaitu:

- **PER TIGA BULAN:** (1) Konflik dan perselisihan di kawasan hutan dan APL; (2) Pembatasan akses; (3) Akses terhadap FGRM; (4) Akses terhadap mata pencaharian.
- **PER SEMESTER:** (1) Akses terhadap lahan dan sumber daya alam; (2) Tindakan dan respon politik; (3) Kapasitas institusi dalam mengelola risiko lingkungan sosial.

- **PER TAHUN:** (1) Keanekaragaman hayati; (2) Kesetaraan gender dan Inklusi sosial.

Sumber Bacaan Utama

Bahan Presentasi Konsultasi Publik Dokumen Safeguards (Jakarta, 7 Agustus 2019).

Dokumen ESMF dan Ringkasan Dokumen ESMF diunduh 7 Agustus 2019 di: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-perundangan.html>.

EKJERP_ESMF Document_Eng edisi tanggal 16 September 2019.